STRATEGI PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMULIHAN PASCA BENCANA BANJIR ROB DI DESA ERETAN KULON KECAMATAN KANDANGHAUR KABUPATEN INDRAMAYU PROVINSI JAWA BARAT

Azizah Zahra Kamillah
NPP. 33.0373
Program Studi Manajemen Keamanan dan Keselamatan Publik
Email: azizahzahrakamillah@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Bertha Lubis, S.Sos., M.Si.
Email: berths.lubi3@gmail.com

ABSTRACT

Problem Statement: *Eretan Kulon Village, Kandanghaur District, Indramayu Regency is a coastal area experiencing increasingly severe tidal flooding (Banjir Rob), with the number of victims drastically increasing from 82 people in 2021 to 5,943 people in 2025 due to coastal abrasion, land subsidence, and breached retaining walls. This situation is compounded by limited regional budgets, a shortage of trained personnel, and cultural resistance from fishing communities who are reluctant to relocate.* ***Purpose:*** *This study aims to analyze the strategy of the Indramayu Regency Government in post-Rob Flood disaster recovery in Eretan Kulon Village.* ***Method:*** *The study employed a descriptive qualitative approach through field observation, in-depth interviews with seven informants from the Regional Disaster Management Agency (BPBD), the village government, and affected community members, as well as documentation studies. Data analysis was conducted through data reduction, data presentation, and conclusion drawing, supported by SWOT analysis using IFAS and EFAS matrix assessments.* ***Result:*** *The research results show that the strategies implemented include coordination with the Citarum River Basin Management Agency (BBWS Citarum) in sea wall construction, river normalization, relocation of 93 fishermen's houses, and needs assessment through the JITUPASNA Team. However, realization has been suboptimal due to dependence on the central government budget, limited human resources, and low environmental awareness among the community. The SWOT analysis places the local government in Quadrant I with coordinates (1.05; 1.70), indicating that the most appropriate strategy is an aggressive Strength-Opportunity strategy through optimization of regional regulations, strengthening multi-stakeholder partnerships, and sustainable optimal use of mitigation technology.* ***Conclusion:*** *This study concludes that post-tidal flood recovery in Eretan Kulon Village has been implemented through an aggressive SO strategy; however, it remains suboptimal due to budget limitations and inadequate human resource capacity.*

Keywords: *tidal flooding, disaster recovery; local government; strategy*

ABSTRAK

Permasalahan: Desa Eretan Kulon, Kecamatan Kandanghaur, Kabupaten Indramayu merupakan wilayah pesisir yang mengalami dampak Banjir Rob semakin parah, dengan korban terdampak meningkat drastis dari 82 jiwa pada tahun 2021 menjadi 5.943 jiwa pada tahun 2025 akibat abrasi pantai, penurunan muka tanah, dan jebolnya tanggul penahan. Kondisi ini diperparah oleh keterbatasan anggaran daerah, kurangnya personel terlatih, serta resistensi budaya masyarakat nelayan yang sulit direlokasi. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan menganalisis strategi Pemerintah Daerah Kabupaten Indramayu dalam pemulihan pasca bencana Banjir Rob di Desa Eretan Kulon. **Metode:** Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif melalui observasi lapangan, wawancara mendalam terhadap tujuh

informan dari unsur BPBD, pemerintah desa, dan masyarakat terdampak, serta studi dokumentasi. Analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, didukung analisis SWOT melalui penilaian matriks IFAS dan EFAS. **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian menunjukkan strategi yang diterapkan meliputi koordinasi dengan BBWS Citarum dalam pembangunan tanggul laut, normalisasi sungai, relokasi 93 unit rumah nelayan, dan pengkajian kebutuhan melalui Tim JITUPASNA. Namun realisasinya belum optimal akibat ketergantungan pada anggaran pusat, keterbatasan sumber daya manusia, dan rendahnya kesadaran lingkungan masyarakat. Analisis SWOT menempatkan pemerintah daerah pada Kuadran I dengan koordinat (1,05; 1,70), sehingga strategi yang paling tepat adalah strategi agresif *Strength-Opportunity* melalui optimalisasi regulasi daerah, penguatan kemitraan multipihak, serta pemanfaatan teknologi mitigasi secara optimal dan berkelanjutan. **Kesimpulan:** Penelitian ini menyimpulkan bahwa pemulihan pasca bencana Banjir Rob di Desa Eretan Kulon telah dilaksanakan melalui strategi SO yang agresif namun belum optimal akibat keterbatasan anggaran dan kapasitas sumber daya manusia yang belum memadai.

Kata kunci: banjir rob; pemulihan pasca bencana; pemerintah daerah; strategi

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara kepulauan yang terletak di kawasan cincin api Pasifik dan berada di antara tiga lempeng tektonik utama, menjadikan negara ini sangat rentan terkena berbagai jenis bencana alam. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dengan garis pantai yang panjang, Indonesia tergolong rentan terhadap berbagai dampak perubahan iklim dan bencana di wilayah pesisir, seperti abrasi, badai, terutama Banjir Rob. Banjir Rob merujuk pada peristiwa naiknya permukaan air laut hingga menggenangi area daratan yang biasanya terjadi di kawasan pesisir, seringkali diakibatkan oleh kombinasi antara pasang air laut tinggi, gelombang laut, dan faktor meteorologis seperti badai atau angin kencang (Luasan et al., 2024). Studi di Indonesia menunjukkan bahwa masyarakat pesisir umumnya mengembangkan strategi adaptasi mandiri terhadap Banjir Rob, namun kapasitas adaptasi tersebut masih berskala kecil dan bergantung pada dana swadaya, sehingga diperlukan kapasitas adaptasi kelembagaan yang lebih baik dari pemerintah daerah dalam menangani risiko bencana pesisir secara terpadu (Aksa & Afrian, 2022).

Wilayah pantai utara Jawa, khususnya Kabupaten Indramayu, seringkali menjadi langganan bencana Banjir Rob. Di antara wilayah-wilayah tersebut, Desa Eretan Kulon di Kecamatan Kandanghaur menjadi daerah yang paling sering dan paling parah terdampak. Data korban terdampak bencana Banjir Rob di Desa Eretan Kulon menunjukkan lonjakan yang sangat signifikan, dari 82 jiwa pada tahun 2021 menjadi 5.943 jiwa pada tahun 2025 (BPBD Kabupaten Indramayu, 2025). Banjir Rob tidak hanya menyebabkan masalah jangka pendek seperti luka-luka dan pengungsian, tetapi juga menimbulkan dampak jangka panjang seperti menurunnya produktivitas perekonomian masyarakat pesisir akibat lahan pertanian yang terendam air asin serta potensi masalah kesehatan.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (Research Gap)

Desa Eretan Kulon yang terletak di Kecamatan Kandanghaur, Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat, merupakan wilayah pesisir utara Jawa yang menghadapi ancaman serius akibat perubahan iklim global. Berdasarkan data dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Indramayu, wilayah ini mengalami dampak bencana banjir rob yang semakin eskalatif, di mana jumlah korban terdampak melonjak drastis dari 82 jiwa pada tahun 2021 menjadi 5.943 jiwa pada tahun 2025. Fenomena ini dipicu oleh kombinasi faktor alamiah dan struktural, mulai dari abrasi pantai yang masif, penurunan muka tanah (*land subsidence*), curah hujan yang tinggi, hingga jebolnya tanggul penahan air

laut. Dampak jangka panjang dari bencana ini tidak hanya merusak infrastruktur fisik, tetapi juga melumpuhkan produktivitas perekonomian masyarakat nelayan lokal akibat lahan yang terendam air asin serta mengancam stabilitas keamanan publik secara menyeluruh.

Meskipun ancaman bencana di wilayah ini sangat nyata, Pemerintah Kabupaten Indramayu masih dihadapkan pada berbagai keterbatasan internal dan hambatan struktural dalam mengoptimalkan upaya pemulihan. Secara fiskal, terjadi penurunan alokasi anggaran yang signifikan di tingkat desa akibat kebijakan efisiensi, sehingga program penanggulangan pasca-bencana menjadi sangat bergantung pada stimulus anggaran dari pemerintah pusat. Kondisi ini diperparah oleh keterbatasan kapasitas sumber daya manusia (SDM) di BPBD Kabupaten Indramayu, baik dari segi kuantitas personel yang jauh di bawah kebutuhan ideal, maupun dari segi kualitas akademis di mana hampir separuh pegawai berlatar belakang pendidikan setingkat SMA dan belum mendapatkan pembekalan atau pelatihan khusus mengenai manajemen bencana modern. Selain kendala institusional tersebut, proses pemulihan juga mengalami hambatan sosial berupa rendahnya partisipasi dan kesadaran lingkungan dari komunitas lokal, serta adanya resistensi budaya dari masyarakat nelayan yang enggan dipindahkan dari zona rawan bencana meskipun program relokasi baru merealisasikan sebagian kecil dari total penduduk terdampak.

Penyelidikan terhadap kompleksitas masalah ini dibangun di atas fondasi beberapa studi terdahulu yang mengkaji manajemen bencana dan adaptasi wilayah pesisir. Penelitian ini terinspirasi oleh studi yang dilakukan oleh Asrofi dkk. (2017) mengenai strategi adaptasi masyarakat pesisir di Desa Bedono, Kabupaten Demak, yang menemukan bahwa pola adaptasi komunitas cenderung bersifat reaktif dan tidak terstruktur sehingga membutuhkan intervensi kebijakan pemerintah yang lebih sistematis. Gagasan mengenai perlunya penguatan kapasitas institusional ini sejalan dengan argumen Aksa dan Afrian (2022) bahwa meskipun masyarakat pesisir umumnya mengembangkan strategi adaptasi mandiri berbasis swadaya, skala penangannya masih kecil sehingga kapasitas adaptasi kelembagaan dari pemerintah daerah sangat krusial dalam menangani risiko bencana secara terpadu. Selanjutnya, Rahmah dan Ikhsan (2022) serta Setiawan dkk. (2024) mengonfirmasi adanya hambatan struktural yang serupa pada lembaga pelaksana lokal, seperti kendala keterbatasan anggaran, kekurangan SDM terlatih, dan lemahnya koordinasi lintas lembaga. Hambatan manajerial ini dipertegas oleh Marta dan Fersari (2025) yang mengidentifikasi bahwa lemahnya sinergi antarinstansi dalam mengoordinasikan program rehabilitasi dan rekonstruksi merupakan faktor penghambat utama lambatnya proses pemulihan pascabencana. Lebih lanjut, Aulia dan Meiwanda (2022) menambahkan bahwa kurangnya perencanaan yang terstruktur dan minimnya pengetahuan kebencanaan masyarakat menjadi tantangan besar dalam implementasi strategi penanggulangan.

Secara umum, potret literatur dan penelitian terdahulu tersebut menunjukkan dominasi pembahasan pada aspek mitigasi dini, adaptasi mandiri masyarakat, atau manajemen penanganan pada saat tanggap darurat berlangsung. Di sinilah letak kesenjangan penelitian (*research gap*) yang krusial, di mana masih terdapat keterbatasan kajian yang secara spesifik mengevaluasi keefektifan strategi pemerintah daerah dalam fase pemulihan (*post-disaster recovery*), rehabilitasi, dan rekonstruksi pasca-bencana banjir rob. Guna mengisi celah teoretis dan praktis tersebut, penelitian ini hadir dengan menawarkan kebaruan ilmiah (*novelty*) melalui integrasi pendekatan deskriptif kualitatif dengan pisau analisis SWOT menggunakan penilaian matriks faktor internal (IFAS) dan faktor eksternal (EFAS) berdasarkan kerangka Rangkuti (2016). Penggunaan kombinasi metode ini dalam konteks pemulihan pasca-bencana banjir rob di wilayah pesisir utara Jawa belum pernah dieksplorasi secara mendalam oleh peneliti terdahulu yang cenderung hanya berfokus pada identifikasi hambatan kelembagaan. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan guna memberikan gambaran empiris dan merumuskan model strategi penanggulangan yang lebih terstruktur, kolaboratif, dan adaptif bagi pemangku kebijakan daerah.

1.3. Urgensi Penelitian

Penelitian ini penting untuk memberikan gambaran empiris mengenai strategi pemulihan pasca bencana Banjir Rob di Desa Eretan Kulon sebagai dasar perumusan kebijakan yang lebih responsif dan berkelanjutan oleh pemerintah setempat. Apabila penelitian ini tidak dilaksanakan, pemerintah dan pemangku kebijakan akan kekurangan dasar empiris yang kuat dalam memahami efektivitas strategi pemulihan yang telah diterapkan, sehingga perumusan strategi pengembangan program berisiko tidak tepat sasaran, kurang efektif, dan tidak sesuai dengan kebutuhan nyata di lapangan. Akibatnya, upaya pemulihan pasca bencana Banjir Rob dapat berjalan kurang optimal dan potensi kerugian masyarakat pesisir akan terus meningkat.

1.4. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu yang relevan. Pertama, Asrofi dkk meneliti strategi adaptasi masyarakat pesisir dalam penanganan Banjir Rob di Desa Bedono, Kabupaten Demak menggunakan metode kualitatif deskriptif. Penelitian ini menemukan bahwa adaptasi masyarakat bersifat reaktif dan tidak terstruktur, sehingga perlunya intervensi kebijakan pemerintah yang lebih sistematis dan berkelanjutan (Asrofi dkk., 2017). Rahmah & Ikhsan meneliti manajemen bencana dalam penanganan pasca bencana BPBD Kabupaten Aceh Barat dengan metode kualitatif deskriptif, menemukan bahwa kendala utama adalah keterbatasan SDM terlatih, lemahnya koordinasi antarinstansi, dan ketergantungan anggaran dari pemerintah pusat (Rahmah & Ikhsan, 2022). Penelitian Setiawan dkk mengkaji peranan BPBD dalam menanggulangi bencana banjir di Kota Balikpapan, menemukan hambatan berupa kekurangan SDM terlatih, keterbatasan anggaran, dan lemahnya koordinasi lintas lembaga (Setiawan dkk., 2024). Adapun Marta & Fersari yang mengidentifikasi bahwa faktor penghambat utama pemulihan pascabencana adalah keterbatasan sumber daya dan lemahnya sinergi antarinstansi pemerintah dalam mengkoordinasikan program rehabilitasi dan rekonstruksi (Marta & Fersari, 2025). Penelitian Aulia & Meiwanda meneliti strategi penanggulangan bencana banjir oleh BPBD Kota Solok menggunakan kerangka konsep strategi Hunger & Wheelen (2003), menemukan tantangan berupa kurangnya perencanaan terstruktur dan minimnya pengetahuan kebencanaan masyarakat (Aulia & Meiwanda, 2022). Secara umum, penelitian-penelitian tersebut menunjukkan dominasi metode kualitatif dengan beragam pendekatan teoritis serta variasi karakteristik objek penelitian yang berbeda-beda sesuai fokus kajian masing-masing.

1.5. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penelitian ini merupakan penelitian baru yang berbeda dari penelitian terdahulu, dilihat dari segi objek, lokasi, dan fokus penelitian. Penelitian ini secara spesifik mengkaji strategi pemerintah daerah dalam pemulihan pasca bencana Banjir Rob dengan menggunakan analisis SWOT Rangkuti (2016) yang mencakup faktor Kekuatan, Kelemahan, Peluang, dan Ancaman di Desa Eretan Kulon, Kabupaten Indramayu. Kebaruan ini terletak pada penggunaan analisis SWOT beserta skoring IFAS dan EFAS dalam konteks pemulihan pasca bencana Banjir Rob di wilayah pesisir utara Jawa yang belum pernah diteliti sebelumnya dengan kombinasi metode dan lokasi yang sama. Penelitian terdahulu cenderung berfokus pada identifikasi hambatan kelembagaan dan keterbatasan sumber daya, sedangkan penelitian ini menekankan model strategi penanggulangan yang lebih terstruktur, kolaboratif, dan adaptif.

1.6. Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi Pemerintah Daerah dalam pemulihan pasca bencana Banjir Rob di Desa Eretan Kulon, Kecamatan Kandanghaur, Kabupaten Indramayu.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan pendekatan induktif. Pemilihan metode ini didasarkan pada kebutuhan untuk memahami secara mendalam bagaimana dan mengapa strategi pemulihan pasca bencana Banjir Rob diterapkan, berjalan, dan menghasilkan dampak. Metode penelitian kualitatif adalah pendekatan yang berlandaskan pada paradigma postpositivisme atau interpretatif, di mana peneliti berfungsi sebagai instrumen utama dalam pengumpulan data (Sugiyono, 2022).

Sumber data terdiri dari data primer melalui observasi lapangan, wawancara mendalam semi terstruktur kepada tujuh informan yang dipilih secara purposive sampling, serta dokumentasi. Informan terdiri dari Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Indramayu, Sekretaris BPBD, Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD, Kepala Desa Eretan Kulon, serta tiga orang masyarakat terdampak. Pemilihan informan didasarkan pada peran dan keterlibatan langsung mereka dalam pengelolaan serta pelaksanaan pemulihan pasca bencana Banjir Rob guna mendapatkan gambaran yang utuh dari sisi kebijakan, pelaksana, serta penerima manfaat.

Analisis data dilakukan menggunakan teknik Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Analisis diperkuat dengan analisis SWOT menggunakan matriks IFAS (Internal Factor Analysis Summary) dan EFAS (External Factor Analysis Summary) menurut Rangkuti (2016) untuk mengidentifikasi dan merumuskan strategi pemulihan yang tepat. Penelitian dilaksanakan di Desa Eretan Kulon Kecamatan Kandanghaur Kabupaten Indramayu Provinsi Jawa Barat pada bulan Oktober 2025 hingga Januari 2026. Pengumpulan data dilakukan selama kurang lebih dua bulan, yaitu pada bulan Desember 2025 hingga bulan Januari 2026, yang mencakup proses observasi awal, wawancara mendalam, serta pengumpulan dokumentasi kegiatan. Dengan rentang waktu tersebut, penelitian ini diharapkan mampu menggambarkan kondisi pemulihan pasca bencana Banjir Rob di Desa Eretan Kulon secara aktual.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Peneliti menganalisis strategi pemerintah daerah dalam pemulihan pasca bencana Banjir Rob di Desa Eretan Kulon menggunakan Analisis SWOT Rangkuti (2016) yang terdiri dari empat dimensi, yaitu Strength (Kekuatan), Weakness (Kelemahan), Opportunities (Peluang), dan Threats (Ancaman).

3.1. Faktor Kekuatan (Strength)

Kekuatan utama Pemerintah Kabupaten Indramayu terletak pada ketersediaan regulasi yang jelas dalam pemulihan pasca bencana. Regulasi yang menjadi dasar hukum mencakup Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008, Peraturan Kepala BNPB Nomor 17 Tahun 2010, dan Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 3 Tahun 2016. Selain itu, terdapat tiga Surat Keputusan Bupati yang bersifat operasional, yaitu SK Bupati Siaga Darurat, SK Bupati Tanggap Darurat, dan SK Tim Rehabilitasi dan Rekonstruksi. Pengelolaan anggaran didukung melalui mekanisme
Dana Siap Pakai (DSP) dan Belanja Tidak Terduga (BTT) sebesar 50 miliar setiap tahunnya. Kewajiban pemerintah daerah dalam konteks penanggulangan bencana meliputi pengalokasian dana, integrasi penanggulangan bencana dalam pembangunan daerah, perlindungan masyarakat dari ancaman bencana, pelaksanaan tanggap darurat, dan pemulihan pasca bencana (Heryati, 2020).

Koordinasi antar perangkat daerah telah berjalan sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing. BPBD berperan sebagai koordinator utama melalui Tim JITUPASNA (Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana) yang menghasilkan data valid sebagai acuan perangkat daerah lain. Dinas PUPR berperan dalam perbaikan infrastruktur fisik, Dinas Sosial dalam pemberian bantuan logistik, dan BASARNAS dalam operasi evakuasi. Koordinasi fisik juga melibatkan BBWS Citarum untuk pembangunan infrastruktur. Hasil koordinasi telah menghasilkan perbaikan akses jalan, pembangunan irigasi dan selokan, serta

normalisasi DAS. Dalam konteks penyaluran bantuan logistik kepada korban bencana banjir, Ristiani dkk. (2024) menemukan bahwa keberhasilan distribusi bantuan sangat ditentukan oleh kualitas fungsi perencanaan, pengadaan, penyimpanan, dan pengendalian yang dilakukan BPBD secara terstruktur; koordinasi yang baik antara pimpinan dan pegawai sebelum penyaluran ke lokasi bencana terbukti menjadi kunci ketepatan sasaran dan ketepatan waktu distribusi bantuan kepada korban (Ristiani dkk., 2024). Sejalan dengan itu, Nugroho (2022) menemukan bahwa penggunaan metode Damage and Loss Assessment (DaLA) yang serupa dengan pendekatan JITUPASNA terbukti efektif dalam meningkatkan pelayanan pemulihan pasca bencana, khususnya pada dimensi pemahaman program dan ketercapaian tujuan (Nugroho, 2022). Lebih lanjut, Lubis & Muslim (2024) menegaskan bahwa koordinasi antara pemerintah daerah, TNI, Polri, dan lembaga sosial merupakan elemen krusial dalam penanganan bencana, di mana sistem peringatan dini (Early Warning System/EWS) yang dipasang di berbagai titik strategis terbukti mampu meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat dan mempercepat respons evakuasi saat bencana terjadi (Lubis & Muslim, 2024).

3.2. Faktor Kelemahan (Weakness)

Faktor kelemahan paling utama adalah keterbatasan pendanaan. Dana Desa Eretan Kulon mengalami penurunan signifikan dari sekitar Rp1,3 miliar menjadi hanya Rp373 juta akibat kebijakan efisiensi dan pemangkasan anggaran. Ketimpangan ini menyebabkan program pemulihan sangat bergantung pada bantuan pemerintah pusat. Relokasi yang terealisasi pun baru 93 unit rumah nelayan, jauh dari kebutuhan total penduduk terdampak yang mencapai lebih dari 10.000 jiwa. Temuan serupa ditemukan oleh Ristiani dkk. (2024) dalam kajian penyaluran bantuan logistik bencana banjir di Kabupaten Pasangkayu, di mana keterbatasan anggaran dan sarana prasarana yang belum memadai — seperti gudang penyimpanan yang terlalu sempit dan terbatasnya armada distribusi — menjadi penghambat utama efektivitas penyaluran bantuan kepada korban bencana (Ristiani dkk., 2024). Kondisi ini mencerminkan apa yang dikemukakan Polyando (2020) bahwa daerah-daerah berciri pesisir dan kepulauan di Indonesia secara struktural mengalami ketimpangan akses fiskal akibat sistem desentralisasi yang belum sepenuhnya memperhatikan karakteristik unik wilayah pesisir, sehingga ketergantungan tinggi pada alokasi pemerintah pusat menjadi hambatan sistemik yang terus berulang dalam pembangunan dan pemulihan bencana di daerah-daerah pesisir (Polyando, 2020).

Tabel 1.
Jumlah Pegawai Berdasarkan Status Kepegawaian

No.	Status Pegawai	Jumlah (orang)
1	Pegawai Negeri Sipil	19
2	Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)	7
3	Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu	18
	JUMLAH	44

Sumber: LAKIP BPBD Kabupaten Indramayu, 2025

Tabel 1 menunjukkan BPBD Kabupaten Indramayu hanya memiliki 44 pegawai, dengan PNS berjumlah 19 orang, PPPK berjumlah 7 orang, dan PPPK Paruh Waktu sekaligus PUSDALOPS PB berjumlah 18 orang, jauh di bawah kebutuhan ideal 90 orang (satu kompi).

Tabel 2.
Jumlah Pegawai Berdasarkan Status Pendidikan

No	Jenjang Pendidikan	Jumlah (orang)

1	Strata 3	0
2	Strata 2	0
3	D-IV/Strata 1	22
4	Diploma III	0
5	SLTA/SMA/Sederajat	21
6	SLTP/SMP/Sederajat	1
	Jumlah	44

Sumber: BPBD Kabupaten Indramayu, 2025

Pada Tabel 2 menunjukkan selain keterbatasan jumlah, hampir separuh pegawai berlatar pendidikan setingkat SMA yang secara umum belum memiliki pembekalan akademis memadai untuk menangani kompleksitas manajemen bencana modern mulai dari pengkajian risiko, penyusunan rencana kontijensi, manajemen logistik darurat, hingga koordinasi multisektor. Banyak pegawai yang belum memiliki pengetahuan dan pelatihan khusus mengenai kebencanaan, terutama dalam pemulihan pasca bencana. Menurut Eviany dan Sutiyo (2023), aspek manajerial penanggulangan bencana menuntut kapasitas SDM yang tidak hanya memadai secara kuantitas, tetapi juga berkualitas dalam hal pemahaman terhadap manajemen keamanan dan keselamatan publik secara komprehensif (Eviany, E & Sutiyo, 2023). Kondisi ini juga dikonfirmasi oleh kajian Prianto & Abdillah (2023) yang menemukan bahwa desentralisasi di Indonesia memang memperkuat tata kelola bencana di tingkat lokal, namun seringkali tidak disertai dengan sumber daya yang memadai, sehingga kapasitas pemerintah daerah dalam merespons bencana bervariasi secara signifikan antar daerah dan berdampak langsung pada efektivitas penanganan bencana (Prianto & Abdillah, 2023).

3.3. Faktor Peluang (Opportunities)

Pemerintah pusat telah memberikan dukungan signifikan melalui pembangunan fisik berupa tanggul laut atau giant sea wall, relokasi 93 unit rumah nelayan, kompensasi bangunan di tepi sungai sebesar Rp10 juta per rumah dari Pemerintah Provinsi, serta dukungan pendanaan melalui Dana Siap Pakai (DSP). Koordinasi dengan BBWS Citarum juga berjalan dengan baik untuk penanganan infrastruktur pesisir. Dukungan pemerintah pusat ini sejalan dengan gagasan desentralisasi asimetris yang dikemukakan Polyando (2020), bahwa daerah-daerah pesisir dan kepulauan memerlukan kebijakan khusus dari pemerintah pusat yang bersifat afirmatif, mengingat keterbatasan kapasitas fiskal daerah dalam mengelola wilayah yang rentan terhadap bencana dan perubahan lingkungan secara mandiri (Polyando, 2020).

BPBD Kabupaten Indramayu pernah memiliki sistem pengawasan banjir hulu bernama SI ABAH BANYU yang memberikan notifikasi terkait ketinggian air dan tingkat kerawanan. Meskipun saat ini tidak aktif, sistem ini berpotensi diaktifkan kembali. Selain itu, terdapat tiga bendungan besar (Jatigede, Cipanas, dan Sadawarna) yang berfungsi menahan peningkatan volume air saat hujan deras, serta pengembangan rumah panggung sebagai inovasi bangunan tahan rob.

Sektor swasta telah berperan aktif melalui kegiatan mitigasi bersama pemerintah daerah, khususnya dalam penanggulangan bencana pada objek-objek vital. Program Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB) yang melibatkan perguruan tinggi dan mahasiswa sebagai relawan edukasi kebencanaan juga menjadi peluang strategis untuk memperluas sumber pembiayaan dan meningkatkan kapasitas SDM. Hal ini sejalan dengan temuan Lubis & Muslim (2024) bahwa program SPAB dan Kelurahan Tangguh Bencana terbukti efektif meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mendeteksi dan merespons tanda-tanda awal bencana, sekaligus membangun budaya kesiapsiagaan yang lebih proaktif di tingkat komunitas (Lubis & Muslim, 2024).

3.4. Faktor Ancaman (Threats)

Kesadaran masyarakat masih sangat minim akibat pengaruh media sosial, budaya, dan mata pencaharian sebagai nelayan. Partisipasi warga dalam program pemulihan seperti kerja bakti sangat rendah. Lubis & Muslim (2024) mengidentifikasi bahwa salah satu tantangan utama dalam membangun ketahanan masyarakat terhadap bencana adalah minimnya kesadaran publik dan kurangnya koordinasi antara pemerintah dengan masyarakat, yang menyebabkan respons terhadap bencana menjadi tidak optimal dan pemulihan pasca bencana berlangsung lebih lambat (Lubis & Muslim, 2024). Melalui wawancara dengan peneliti kepada Kepala Desa Eretan Kulon mengatakan bahwa ”Masyarakat kurang berpartisipasi karena terpengaruh informasi media sosial dan menganggap Dana Desa yang besar seharusnya bisa menyelesaikan semua persoalan tanpa bantuan masyarakat”. Sementara itu, berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan masyarakat terdampak, mengatakan bahwa ” Dalam menghadapi persoalan Banjir Rob ini masih banyak masyarakat yang kurang peduli lingkungan dengan membuang sampah sembarangan ke selokan, yang justru menghambat jalannya pemulihan”.

Faktor alam merupakan ancaman terbesar yang tidak dapat dikendalikan langsung. Kondisi geografis Desa Eretan Kulon dengan elevasi sangat rendah (4 mdpl), abrasi pantai yang telah mencapai 3 km, angin kencang, dan gelombang tinggi menyebabkan rob terus berulang. Perubahan iklim juga memperparah kondisi ini melalui kenaikan muka air laut dan peningkatan intensitas curah hujan.

Tabel 3.

Perubahan Iklim

Bulan	Jumlah Curah Hujan (hari)	Jumlah Hari Matahari (jam)	Penyinaran Hujan (mm/tahun)
Januari	304,70	28	4,1
Februari	439,00	25	5,2
Maret	248,00	23	4,6
April	343,50	20	5,5
Mei	8,20	4	6,9
Juni	52,70	3	5,7
Juli	155,10	27	6,4
Agustus	0,00	31	7,0
September	125,30	30	6,8
Oktober	34,50	31	7,4
November	334,40	30	4,6
Desember	153,70	31	2,8

Sumber: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, 2025

Pada tabel 3 menurut BMKG, curah hujan tertinggi di Kabupaten Indramayu terjadi pada bulan Februari sebesar 439,00 mm dengan 25 hari hujan, yang memperparah genangan rob ketika terjadi bersamaan dengan pasang laut. Ketika hujan deras terjadi bersamaan dengan pasang laut, kapasitas saluran drainase dan sungai menjadi tidak mampu menampung debit air sehingga genangan rob menjadi lebih luas dan berlangsung lebih lama. Hal ini

menyebabkan proses pemulihan pasca bencana menjadi terhambat, terutama dalam perbaikan jalan, tanggul, rumah warga, serta fasilitas umum lainnya yang kembali rusak akibat genangan yang berulang.

3.5. Skoring IFAS dan EFAS Tabel

1.

Skoring IFAS

No	Faktor Internal	Bobot	Rating	Bobot x Rating
	Kekuatan (S)			
1	Adanya Regulasi	0,30	4	1,20
2	Koordinasi Perangkat Daerah Terkait	0,25	3	0,75
	Kelemahan (W)			
1	Keterbatasan Anggaran	0,25	2	0,50
2	Keterbatasan Kuantitas dan Kualitas	0,20	2	0,40 SDM
	Total (S+W)	1,00		**2,85**

Sumber: Diolah oleh peneliti, 2026

Tabel 2.

Skoring EFAS

No	Faktor Eksternal	Bobot	Rating	Bobot x Rating
	Peluang (O)			
1	Dukungan Pemerintah Pusat	0,30	4	1,20
2	Teknologi Mitigasi	0,20	3	0,60
3	Kemitraan Sektor Swasta dan LSM	0,15	3	0,45
	Ancaman (T)			
1	Kurangnya Kesadaran Masyarakat	0,20	2	0,40
2	Faktor Alam	0,15	1	0,15
	Total (O+T)	1,00		**2,80**

Sumber: Diolah oleh peneliti, 2026

3.6. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Berdasarkan hasil skoring IFAS dan EFAS, Pemerintah Daerah Kabupaten Indramayu berada pada Kuadran I dengan koordinat (1,05; 1,70), yaitu total skor kekuatan (1,95) dikurangi total skor kelemahan (0,90) pada sumbu X, dan total skor peluang (2,25)

dikurangi total skor ancaman (0,55) pada sumbu Y. Posisi ini mencerminkan kondisi yang menguntungkan karena pemerintah daerah memiliki kekuatan internal yang memadai serta terbukanya peluang eksternal yang dapat dimanfaatkan secara optimal. Temuan ini sejalan dengan penelitian Asrofi dkk. (2017) bahwa ketersediaan regulasi dan dukungan pemerintah pusat menjadi faktor kunci dalam keberhasilan pemulihan pasca bencana di wilayah pesisir (Asrofi dkk., 2017).

Berbeda dengan temuan Marta dan Fersari (2025) yang menemukan bahwa kendala utama pemulihan pasca bencana adalah keterbatasan sumber daya dan lemahnya koordinasi antarinstansi, penelitian ini menemukan bahwa koordinasi antarinstansi di Kabupaten Indramayu telah berjalan cukup baik melalui mekanisme JITUPASNA, meskipun keterbatasan SDM dan anggaran masih menjadi hambatan signifikan (Marta & Fersari, 2025). Chotimah (2022) melalui kajian pemulihan pasca bencana erupsi Merapi dengan model Penta Helix menunjukkan bahwa kolaborasi multipihak antara pemerintah, sektor swasta, akademisi, komunitas, dan media terbukti mempercepat proses pemulihan secara signifikan (Chotimah, 2022). Dalam dimensi operasional penanganan bencana, Ristiani dkk. (2024) menegaskan bahwa efektivitas pemulihan pasca bencana sangat bergantung pada kualitas manajemen logistik yang mencakup fungsi perencanaan, pengadaan, penyimpanan, dan pengendalian; tanpa pengelolaan logistik yang baik, upaya pemulihan yang telah direncanakan secara strategis berisiko tidak menjangkau korban secara tepat sasaran (Ristiani dkk., 2024). Hal ini semakin memperkuat argumentasi bahwa strategi agresif StrengthOpportunity melalui optimalisasi regulasi, penguatan kemitraan multipihak, dan pemanfaatan teknologi mitigasi merupakan pendekatan yang paling tepat untuk kondisi Desa Eretan Kulon saat ini.

3.7. Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Peneliti menemukan temuan menarik terkait masalah struktural wilayah pesisir yang belum tertangani secara komprehensif. Meskipun tanggul laut telah dibangun, air laut masih dapat masuk melalui aliran sungai dan sistem drainase yang tidak dilengkapi pintu air. Kondisi ini menunjukkan bahwa pemulihan yang hanya bersifat rehabilitasi fisik permukaan tanpa disertai langkah mitigasi jangka panjang seperti pembangunan pintu air, rehabilitasi mangrove, dan penataan wilayah pesisir yang berkelanjutan akan terus menghadapi siklus kerusakan yang berulang. Selain itu, resistensi budaya masyarakat nelayan yang sulit direlokasi menjadi tantangan sosial tersendiri yang memerlukan pendekatan partisipatif dan kebijakan tata ruang yang mempertimbangkan aspek sosial-ekonomi masyarakat. Hal ini sejalan dengan kajian Kim & Kim (2024) yang menemukan bahwa komunitas pesisir cenderung kurang tangguh terhadap banjir rob dibandingkan terhadap bencana lainnya, dan bahwa terdapat kesenjangan signifikan antara kebijakan pengurangan risiko bencana yang bersifat formal dengan praktik nyata di lapangan, sehingga diperlukan pendekatan yang lebih integratif antara pemerintah dan komunitas dalam pengelolaan risiko banjir pesisir (Kim & Kim, 2024).

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, strategi pemerintah daerah dalam pemulihan pasca bencana Banjir Rob di Desa Eretan Kulon melibatkan keterkaitan erat antara faktor internal dan eksternal melalui analisis SWOT, dengan skor IFAS kekuatan sebesar 1,95 yang mencakup ketersediaan regulasi dan koordinasi perangkat daerah berbasis JITUPASNA, sementara skor IFAS kelemahan sebesar 0,90 mencerminkan keterbatasan anggaran serta keterbatasan kuantitas dan kualitas SDM. Dari sisi eksternal, skor EFAS peluang sebesar 2,25 meliputi dukungan pemerintah pusat berupa pembangunan giant sea wall, relokasi 93 unit rumah nelayan, dan kemitraan multipihak, sedangkan skor EFAS ancaman sebesar 0,55 berupa rendahnya kesadaran masyarakat dan faktor alam.

Hasil perhitungan menempatkan Pemerintah Daerah Kabupaten Indramayu pada Kuadran I koordinat (1,05; 1,70), sehingga strategi yang paling tepat adalah strategi agresif Strength-Opportunity melalui optimalisasi regulasi daerah yang diintegrasikan dengan dukungan pembangunan fisik dan pendanaan pemerintah pusat, perluasan kemitraan strategis dengan sektor swasta dan perguruan tinggi untuk memperluas sumber pembiayaan dan meningkatkan kapasitas SDM, serta pemanfaatan teknologi mitigasi secara optimal dan berkelanjutan, termasuk reaktivasi sistem SI ABAH BANYU, guna mempercepat pemulihan pasca bencana Banjir Rob yang lebih tangguh, berkelanjutan, dan berpihak pada keselamatan masyarakat pesisir Desa Eretan Kulon. Haer et al. (2023) menegaskan bahwa momen pemulihan pasca banjir merupakan peluang strategis untuk mengintegrasikan upaya pengurangan risiko bencana jangka panjang, sehingga pemulihan tidak sekadar mengembalikan kondisi semula tetapi juga membangun ketangguhan yang lebih besar terhadap bencana di masa mendatang (Haer et al., 2023). Lebih lanjut, Leal Filho et al. (2025) mengingatkan bahwa terdapat kesenjangan yang persisten antara kerangka kebijakan nasional dan realitas di tingkat lokal, khususnya terkait bahaya yang berkembang lambat seperti penurunan muka tanah dan kenaikan permukaan air laut, sehingga diperlukan strategi yang bersifat adaptif, konteks-spesifik, dan berorientasi pada pemberdayaan komunitas untuk melindungi wilayah pesisir yang rentan terhadap perubahan iklim (Leal Filho et al., 2025).

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian. Selain itu, penelitian juga hanya dilakukan pada satu desa saja. Kemudian, keterbatasan akses terhadap data anggaran daerah secara menyeluruh menjadi hambatan dalam analisis yang lebih komprehensif.

Arah Masa Depan Penelitian (future work). Peneliti menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi-lokasi pesisir serupa yang terdampak Banjir Rob di sepanjang pantai utara Jawa, atau penelitian komparatif antara strategi pemulihan yang diterapkan di berbagai kabupaten pesisir untuk menemukan model pemulihan terbaik dan lebih menyeluruh.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih ditujukan kepada Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Indramayu beserta seluruh jajarannya dan Kepala Desa Eretan Kulon beserta seluruh jajarannya yang telah memberikan kesempatan dan informasi kepada peneliti untuk melaksanakan penelitian ini, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

Aksa, F. I., & Afrian, R. (2022). Community adaptation strategies toward tidal flood: A case study in Langsa, Indonesia. *Jamba: Journal of Disaster Risk Studies, 14(1), 1258*. https://doi.org/10.4102/jamba.v14i1.1258.

Asrofi, A., dkk. (2017). Strategi adaptasi masyarakat pesisir dalam penanganan bencana Banjir Rob dan implikasinya terhadap ketahanan wilayah. *Jurnal Ketahanan Nasional, 23(2), 125-144. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.* https://doi.org/10.22146/jkn.26257.

Aulia, R., & Meiwanda, G. (2022). Strategi penanggulangan bencana banjir oleh BPBD Kota Solok. *Jurnal Administrasi Publik, 8(1), 45–57.* https://doi.org/10.58684/jarvic.v1i3.23.

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, (2025). *Perubahan Iklim Kabupaten Indramayu 2025*. BMKG Indonesia.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Indramayu, (2025). *Korban Terdampak Bencana Banjir Rob 2025*. BPBD Kab Indramayu.

Badan Pusat Statistik Kab. Indramayu, (2025). *Kabupaten Indramayu Dalam Angka 2025*. BPS Kab Indramayu.

Badan Pusat Statistik Kab. Indramayu, (2025). *Pendataan Potensi Desa 2025*. BPS Kab Indramayu.

Chotimah, H. C. (2022). Pemulihan Pasca Bencana Erupsi di Kawasan Wisata Merapi Daerah Istimewa Yogyakarta Ditinjau dari Model Penta Helix. *Jurnal Konstituen, 4*(2), 173–186. https://doi.org/10.33701/jk.v4i2.2435.

Eviany, E., & Sutiyo. (2023). *Perlindungan Masyarakat: Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Manajemen Kebencanaan*. PT. Nas Media Indonesia. ISBN 978-623-155-142-9. http://eprints2.ipdn.ac.id/id/eprint/1251/.

Haer, T., Botzen, W. J. W., & Aerts, J. C. J. H. (2023). Post-flood recovery: An opportunity for disaster risk reduction? *International Journal of Disaster Risk Reduction, 97*, *104070.* https://doi.org/10.1016/j.ijdrr.2023.104070.

Heryati, S. (2020). Peran Pemerintah Daerah Dalam Penanggulangan Bencana. *Jurnal Pemerintahan dan Keamanan Publik (JP dan KP), 2*(2), 139–146. https://doi.org/10.33701/jpkp.v2i2.1088.

Kim, J., & Kim, T. (2024). The gaps between institutional and practical disaster risk management measures on coastal flood risks in South Korea's coastal communities. *International Journal of Disaster Risk Science, 15(4), 579–594*. https://doi.org/10.1007/s13753-024-00579-1.

Leal Filho, W., Ayal, D. Y., Azeiteiro, U. M., Balogun, A. L., Balzan, M. V., Sidsaph, H., & Papadimitriou, E. (2025). Disaster management strategies in response to climate change: A focus on climate-vulnerable coastal areas in Indonesia. In *Innovative Approaches to Disaster Management and Resilience*. Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-032-15334-0_10.

Luasan, S., dkk. (2024). Studi Luasan Genangan Banjir Rob Akibat Kenaikan Muka Air Laut Dan Penurunan Muka Tanah Di Kecamatan Sayung, Demak. *Indonesian Journal of Oceanography, 6(4), 316-323.* https://doi.org/10.14710/ijoce.v6i4.19468.

Lubis, B., & Muslim. (2024). Community Resilience in Handling Flood Disaster in Bogor City, West Java Province. *Jurnal Pemerintahan dan Keamanan Publik (JP dan KP), 6*(2), 142–156. https://doi.org/10.33701/jpkp.v6i2.4528.

Marta, D. J., & Fersari, T. P. (2025). Manajemen bencana banjir dalam meningkatkan ketahanan wilayah oleh BPBD Kota Semarang. *Jurnal RIPTEK, 19(1), 39-48*. https://doi.org/10.35475/riptek.v19i1.306.

Nugroho, F. M. (2022). Efektivitas Penggunaan Metode Damage and Loss Assessment (DaLA) dalam Meningkatkan Pelayanan Pemulihan Pasca Bencana di Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat. *Jurnal Pemerintahan dan Keamanan Publik (JP dan KP), 4*(1). https://doi.org/10.33701/jpkp.v4i1.2552.

Polyando, P. (2020). *Jalan Tengah Desentralisasi Bagi Daerah Otonom Berkarakteristik Kepulauan Di Indonesia*. Kencana (Prenada Media Group). ISBN 978-623-218-477-0.

Prianto, A. L., & Abdillah, A. (2023). Resilient cities, vulnerable communities: Disaster governance in the coastal cities in Indonesia. In A. Singh (Ed.), *International Handbook of Disaster Research*. Springer, Singapore. https://doi.org/10.1007/978981-16-8800-3_193-1.

Rahmah, S., & Ikhsan, I. (2022). Manajemen bencana dalam penanganan pasca bencana BPBD Kabupaten Aceh Barat. *Journal of Social Politics and Governance (JSPG), 4(1), 24-37.* https://doi.org/10.24076/jspg.2022v4i1.776.

Rangkuti, F. (2016). *Analisis SWOT: Teknik Membedah Kasus Bisnis*. PT. Gramedia Pustaka Utama.

Ristiani, I. Y., Iryadi, F., Putri, N. A., & Supriatna, A. (2024). Distribution of Logistics Assistance for Flood Victims in Pasangkayu Regency. *Jurnal Konstituen, 6*(2). https://doi.org/10.33701/jk.v6i2.4994.

Setiawan, R., dkk. (2024). Peranan BPBD dalam menanggulangi bencana banjir di Kota Balikpapan. *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Kebijakan Publik, 9(3), 112–126*. https://doi.org/10.36277/identifikasi.v10i1.319.

Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kualitatif*. Alfabeta.

Syafiie, I. (2018). *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. PT Refika Aditama.